



Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis POAC: Kajian Teoritis dan Praktis dalam Membangun Tata Kelola Pemberdayaan Berkelanjutan

Mardan Mahmuda¹ Romi Altavia²

¹UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: mardan_mahmuda@uinib.ac.id

²UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: romialtavia@uinib.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment is a development approach that positions communities as the primary actors in social, economic, and institutional transformation. Although various participatory-based empowerment programs have been implemented, their sustainability continues to face challenges related to governance, institutional coordination, resource management, and evaluation. These conditions highlight the importance of a management approach that systematically integrates planning, organizing, implementation, and control. This article aims to analyze the POAC management functions (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) as a conceptual framework for community empowerment through a literature review of scholarly publications addressing management concepts, community empowerment, and the management of local empowerment programs. The review indicates that Planning ensures programs are aligned with community needs; Organizing strengthens institutional structures and clarifies the distribution of roles; Actuating enhances community participation through facilitation and capacity building; whereas Controlling ensures program sustainability through monitoring and evaluation. The findings conclude that POAC provides a comprehensive management framework that integrates organizational governance with the principles of community participation and self-reliance.

Keywords: *empowerment management, POAC, empowerment governance, participatory development, empowerment sustainability*

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Meskipun berbagai program berbasis partisipatif telah dilaksanakan, keberlanjutannya masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola, koordinasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya, serta aspek evaluasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan manajemen yang mengintegrasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sebagai kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat melalui kajian literatur dari berbagai publikasi ilmiah yang membahas tentang konsep manajemen, pemberdayaan masyarakat, serta praktik pengelolaan program pemberdayaan pada tingkat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Planning* memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat; *Organizing* memperkuat kelembagaan dan pembagian peran; *Actuating* meningkatkan partisipasi melalui pendampingan dan penguatan kapasitas; sedangkan *Controlling* menjamin keberlanjutan melalui monitoring dan evaluasi. Sintesis kajian menegaskan bahwa POAC merupakan kerangka manajemen yang mengintegrasikan tata kelola organisasi dengan prinsip partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Kata kunci: manajemen pemberdayaan, POAC, tata kelola pemberdayaan, pembangunan partisipatif, pemberdayaan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan masyarakat mengalami perubahan dari pendekatan yang sebelumnya bersifat *top-down* menuju pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam pendekatan modern, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima manfaat suatu program, tetapi sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan, mengelola sumber daya, serta menentukan arah perubahan berdasarkan kebutuhan lokal.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kehidupannya secara lebih mandiri. Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan kemampuan dalam mengambil keputusan.

Namun, proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu atau kelompok. Program pemberdayaan juga membutuhkan tata kelola yang baik agar tujuan yang telah dirancang dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, banyak program pemberdayaan menghadapi tantangan bukan karena kurangnya potensi masyarakat, tetapi karena lemahnya aspek pengelolaan program, seperti perencanaan yang kurang matang, koordinasi antaraktor yang belum optimal, keterbatasan

pengorganisasian, serta evaluasi yang belum berjalan secara sistematis.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai proses sosial, tetapi juga sebagai proses manajerial.

Dalam perspektif manajemen klasik, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan unsur penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Terry & Rue, 2010). Prinsip tersebut memiliki relevansi dalam pemberdayaan masyarakat karena setiap program pemberdayaan memerlukan pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas secara terencana.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia telah dikembangkan melalui berbagai sektor, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan desa, penguatan kelompok masyarakat, dan pengembangan kelembagaan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memastikan proses program berjalan sesuai tujuan.

Beberapa persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan antara lain:

1. Perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat;
2. Keterbatasan koordinasi antar aktor yang terlibat;
3. Lemahnya struktur kelembagaan masyarakat;
4. Rendahnya keberlanjutan program setelah dukungan eksternal berakhir;

5. Kurang optimalnya proses monitoring dan evaluasi.

Harahap (2020) menjelaskan bahwa manajemen pemberdayaan masyarakat membutuhkan pengelolaan yang sistematis karena pemberdayaan merupakan proses yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada substansi program, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dikelola.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami proses pengelolaan pemberdayaan masyarakat adalah fungsi manajemen POAC. Dalam teori manajemen klasik, Terry dan Rue (2010) menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri atas:

1. *Planning* (Perencanaan), yaitu proses menentukan tujuan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi;
2. *Organizing* (Pengorganisasian), yaitu proses mengatur sumber daya dan pembagian tugas agar kegiatan dapat berjalan efektif;
3. *Actuating* (Penggerakan), yaitu proses mengarahkan dan mendorong anggota organisasi untuk melaksanakan rencana;
4. *Controlling* (Pengawasan), yaitu proses memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana melalui pemantauan dan evaluasi.

Dalam artikel ini, POAC tidak diposisikan sebagai satu-satunya pendekatan dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat, tetapi digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi.

Susanto (2022) melalui kajiannya mengenai penerapan prinsip POACE

dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa fungsi manajemen dapat membantu membangun pengelolaan program yang lebih sistematis.

Dengan demikian, integrasi konsep POAC dalam pemberdayaan masyarakat memberikan perspektif bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program.

Kajian mengenai pemberdayaan masyarakat telah berkembang dalam berbagai perspektif, terutama yang menekankan aspek partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan pembangunan lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki serta dukungan kelembagaan yang tersedia (Friedmann, 1992; Zimmerman, 2000; Mardikanto & Soebiato, 2017).

Namun demikian, sebagian besar kajian pemberdayaan masyarakat masih lebih banyak menempatkan masyarakat sebagai fokus perubahan sosial dan pembangunan, sementara aspek manajemen pengelolaan proses pemberdayaan belum selalu mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, program pemberdayaan melibatkan berbagai sumber daya, aktor, kelembagaan, serta tahapan kegiatan yang membutuhkan pengelolaan secara sistematis.

Di sisi lain, kajian mengenai fungsi manajemen POAC telah banyak digunakan dalam berbagai bidang organisasi, termasuk pengelolaan program pembangunan dan kegiatan berbasis masyarakat (Saputra & Ali, 2022; Fahmi, 2023). Namun, penerapan POAC dalam konteks pemberdayaan

masyarakat masih sering dipahami secara parsial, misalnya hanya sebagai pendekatan pengelolaan program, bukan sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara proses manajemen dan tujuan pemberdayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) berupa belum banyaknya kajian konseptual yang mengintegrasikan teori manajemen POAC dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dikendalikan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara fungsi manajemen POAC dan proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kajian teoritis dan praktis. Kajian ini berupaya menghasilkan pemahaman konseptual mengenai bagaimana prinsip-prinsip manajemen dapat digunakan sebagai kerangka pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Artikel ini memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan perspektif bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dipahami tidak hanya sebagai proses sosial, tetapi juga sebagai proses manajemen yang membutuhkan tata kelola sistematis.

Kontribusi utama kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori manajemen POAC dengan teori pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif ini, POAC tidak hanya dipahami sebagai fungsi dasar organisasi, tetapi sebagai kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana program pemberdayaan masyarakat dirancang (*planning*), dibangun kelebihannya (*organizing*), didorong

melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi (*actuating*), serta dievaluasi untuk keberlanjutan program (*controlling*).

Dengan demikian, artikel ini menawarkan suatu sintesis konseptual bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pengelola program dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara konsisten.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena tujuan artikel bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai hubungan antara fungsi manajemen POAC dan tata kelola pemberdayaan masyarakat.

Kajian literatur dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang membahas tiga tema utama, yaitu:

1. Konsep manajemen;
2. Konsep pemberdayaan masyarakat;
3. Praktik pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Memiliki keterkaitan langsung dengan tema manajemen pemberdayaan masyarakat;
2. Membahas aspek pengelolaan program, kelembagaan, atau proses pemberdayaan;
3. Memiliki informasi publikasi yang dapat diverifikasi melalui sumber resmi penerbit atau jurnal.

Analisis tersebut dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Identifikasi literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan konsep manajemen, fungsi POAC, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kategorisasi temuan

Literatur yang telah dikaji kemudian diklasifikasikan berdasarkan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

3. Sintesis konseptual

Tahap akhir dilakukan dengan menghubungkan teori manajemen dan temuan penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman mengenai bagaimana POAC dapat diterapkan sebagai kerangka pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Manajemen dalam Perspektif Organisasi

Manajemen merupakan proses mengelola sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu landasan utama teori manajemen klasik berasal dari pemikiran Fayol (1949) yang menjelaskan bahwa aktivitas administrasi organisasi dapat dipahami melalui beberapa fungsi dasar manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Pemikiran tersebut menjadi salah satu fondasi perkembangan teori manajemen modern dan memberikan dasar konseptual bagi berbagai pendekatan fungsi manajemen, termasuk kerangka POAC.

Dalam teori manajemen klasik, keberhasilan organisasi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pengelola dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar manajemen tersebut.

Terry dan Rue (2010) menjelaskan bahwa manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya organisasi. Fungsi tersebut menjadi dasar bagi organisasi dalam mengatur aktivitas, mengoordinasikan pekerjaan, serta memastikan tujuan dapat dicapai.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, konsep manajemen memiliki relevansi karena program pemberdayaan juga melibatkan proses pengelolaan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, kelembagaan, pengetahuan lokal, serta dukungan eksternal.

Dengan demikian, pendekatan manajemen memberikan kerangka untuk memahami bagaimana program pemberdayaan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi.

Namun, penerapan manajemen dalam pemberdayaan masyarakat memiliki karakteristik khusus. Berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi pada efisiensi ekonomi, pemberdayaan masyarakat menekankan aspek peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya dan menentukan arah perubahan secara mandiri.

Dalam perspektif psikologi komunitas, Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan

(*empowerment*) merupakan proses yang memungkinkan individu, organisasi, dan komunitas memperoleh kemampuan untuk meningkatkan kontrol terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konsep pemberdayaan tersebut mencakup tiga tingkat analisis, yaitu tingkat individu, organisasi, dan komunitas yang saling berkaitan dalam membangun kapasitas masyarakat.

Sejalan dengan perspektif tersebut, Friedmann (1992) memandang pemberdayaan sebagai pendekatan pembangunan alternatif yang menekankan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memperoleh kontrol terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan proses pembangunan. Pemberdayaan dalam perspektif Friedmann tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan individu, tetapi juga dengan penguatan kekuatan sosial masyarakat agar mampu menentukan arah perubahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta pengembangan kemampuan dalam mengambil keputusan.

Konsep pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, masyarakat bukan hanya penerima manfaat program, tetapi menjadi pihak yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri (Firman, 2021).

Berdasarkan perspektif tersebut, pemberdayaan memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Partisipasi masyarakat

Masyarakat perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kondisi dan kebutuhan lokal.

2. Penguatan kapasitas

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok untuk mengelola potensi yang dimiliki.

3. Kemandirian

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari terlaksananya suatu program, tetapi dilihat dari seberapa mampu masyarakat mempertahankan hasil program secara berkelanjutan.

Harahap (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses pengelolaan yang sistematis karena melibatkan berbagai unsur yang harus diarahkan menuju tujuan bersama.

POAC sebagai Kerangka Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan teori manajemen klasik, POAC merupakan salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk memahami proses pengelolaan organisasi. Kerangka POAC dalam kajian manajemen memiliki keterkaitan dengan pemikiran Fayol mengenai fungsi administrasi organisasi. Meskipun istilah POAC lebih banyak

dikembangkan dalam literatur manajemen berikutnya, prinsip dasarnya memiliki hubungan dengan gagasan Fayol mengenai pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebagai proses utama dalam mencapai tujuan organisasi (Fayol, 1949).

Dalam artikel ini, POAC digunakan sebagai kerangka analisis konseptual untuk menjelaskan hubungan antara fungsi manajemen dengan proses pemberdayaan masyarakat.

Penerapan fungsi POAC juga telah digunakan dalam berbagai program berbasis masyarakat. Penelitian Fahmi (2023) menunjukkan bahwa fungsi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* dapat diterapkan dalam pengelolaan program desa melalui proses perencanaan kegiatan, koordinasi antar-aktor, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa POAC dapat menjadi kerangka pengelolaan program yang sistematis dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat.

Penelitian Saputra dan Ali (2022) melalui kajian literatur mengenai penerapan manajemen POAC menunjukkan bahwa fungsi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* dapat digunakan sebagai kerangka pengelolaan aktivitas organisasi dalam menghadapi berbagai kondisi perubahan. Perspektif tersebut memperkuat pemahaman bahwa POAC tidak hanya relevan dalam organisasi bisnis, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendekatan analitis dalam pengelolaan program yang melibatkan banyak aktor dan sumber daya.

Penelitian Susanto (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip POAC dalam pemberdayaan masyarakat memberikan kerangka pengelolaan yang

lebih sistematis karena memperhatikan proses perencanaan hingga evaluasi.

Dengan demikian, POAC dapat dipahami sebagai instrumen manajemen yang membantu memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi berkembang menjadi proses pembangunan kapasitas yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Planning* (Perencanaan) dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang menentukan arah pelaksanaan program. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, perencanaan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kegiatan, tetapi juga mencakup proses memahami kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi potensi lokal, serta menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Terry dan Rue (2010) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Jika diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, fungsi *Planning* berarti memastikan bahwa program yang dirancang memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Harahap (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan pemberdayaan masyarakat membutuhkan perencanaan karena proses pemberdayaan melibatkan berbagai unsur yang harus diarahkan secara sistematis.

Studi Hermawati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui “Alokasi Dana Desa”

membutuhkan proses perencanaan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan lokal. Perencanaan menjadi tahap penting agar penggunaan sumber daya desa dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, perencanaan yang baik dalam pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat;
2. Pemetaan potensi lokal;
3. Penentuan tujuan pemberdayaan;
4. Penyusunan strategi kegiatan;
5. Penetapan indikator keberhasilan.

Dalam pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, proses perencanaan perlu dilakukan secara partisipatif agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal menjadi faktor penting dalam membangun rasa memiliki terhadap program serta mendukung keberlanjutan pelaksanaannya (Firman, 2021).

Dalam konteks kelembagaan desa, Cahyanto *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat membutuhkan pengelolaan program dan kelembagaan yang terarah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tahap perencanaan menjadi fondasi penting karena menentukan apakah program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Organizing (Pengorganisasian) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya dan pembagian peran agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Terry dan Rue (2010) menjelaskan bahwa pengorganisasian diperlukan untuk menciptakan hubungan kerja yang jelas sehingga setiap anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat, fungsi *Organizing* memiliki peran penting karena program biasanya melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, kelompok masyarakat, pendamping, organisasi sosial, dan lembaga ekonomi lokal.

Dalam konteks pengelolaan program desa, Hermawati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan pengelola program dalam mengatur keterlibatan berbagai pihak dan mengelola kegiatan pemberdayaan secara terorganisasi.

Amri dan Ferizko (2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik agar potensi masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Sementara itu, Cahyanto *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan kelembagaan BUMDes membutuhkan koordinasi, pembagian peran, dan pengelolaan sumber daya agar mampu mendukung pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, pengorganisasian dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Pembentukan kelompok atau kelembagaan masyarakat;
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab;
3. Penguatan koordinasi antaraktor;
4. Pembangunan jaringan kerja sama;
5. Pengelolaan sumber daya secara efektif.

Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola aktor-aktor yang terlibat.

Actuating (Penggerakan) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Actuating merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan proses menggerakkan individu atau kelompok agar menjalankan aktivitas sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, fungsi penggerakan memiliki karakteristik yang berbeda karena masyarakat bukan sekadar pelaksana kegiatan, tetapi merupakan aktor utama perubahan.

Harahap (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses pendampingan, komunikasi, dan pembinaan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitasnya.

Susanto (2022) menjelaskan bahwa fungsi penggerakan dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan kemampuan pengelola program dalam membangun keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu, penggerakan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Pelatihan peningkatan kapasitas;
2. Pendampingan masyarakat;
3. Motivasi dan penguatan kepercayaan diri;
4. Fasilitasi partisipasi;
5. Pembangunan kerja sama kelompok.

Implementasi fungsi penggerakan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat. Imang *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pelatihan

manajemen keuangan dan pengembangan usaha pada pengelola homestay di Desa Candirejo mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara lebih efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan membutuhkan strategi penggerakan yang mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat.

Shiddiq dan Khikmawati (2022) menunjukkan bahwa dalam praktik pemberdayaan masyarakat, strategi pengelolaan yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

Controlling (Pengawasan) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat desa, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Fahmi (2023) menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam penerapan POAC pada program desa karena membantu memastikan kegiatan berjalan secara terarah dan terukur.

Dalam pemberdayaan masyarakat, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program.

Fungsi pengawasan dalam pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan kemampuan kelembagaan lokal dalam mempertahankan keberlanjutan program. Mekanisme evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur pencapaian kegiatan, tetapi juga untuk

memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dalam menghadapi perubahan dan tantangan pelaksanaan program. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat (Sari *et al.*, 2020).

Pratama (2016) menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan program dan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, fungsi *Controlling* dalam pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Pemantauan pelaksanaan program;
2. Evaluasi hasil kegiatan;
3. Identifikasi hambatan;
4. Penyusunan strategi perbaikan;
5. Penguatan keberlanjutan program.

Cahyanto *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat membutuhkan evaluasi agar kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, *Controlling* menjadi tahap penting yang memastikan program pemberdayaan tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

Model Konseptual Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis POAC

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan proses tersebut tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi

juga oleh kemampuan pengelola program dalam menjalankan fungsi manajemen secara sistematis.

Berdasarkan kajian teori dan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, artikel ini menyusun suatu model konseptual manajemen pemberdayaan masyarakat berbasis POAC. Model ini merupakan hasil sintesis penulis berdasarkan integrasi antara teori manajemen, konsep pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kajian empiris mengenai pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (Fayol, 1949; Terry & Rue, 2010; Mardikanto & Soebiato, 2017; Hermawati *et al.*, 2018; Imang *et al.*, 2023).

Model konseptual ini berangkat dari pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang membutuhkan pengelolaan sistematis. Potensi masyarakat, sumber daya lokal, dukungan kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat menjadi unsur awal yang perlu dikelola melalui fungsi manajemen *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*.

Berdasarkan sintesis antara teori manajemen dan teori pemberdayaan masyarakat, artikel ini menawarkan model konseptual bahwa fungsi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) dapat digunakan sebagai kerangka pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Model ini menempatkan pemberdayaan sebagai suatu proses manajerial yang berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program. Berikut penjelasan sintesisnya.

1. *Planning*: Merancang Arah dan Tujuan Pemberdayaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam manajemen pemberdayaan masyarakat. Perencanaan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kegiatan, tetapi

juga mencakup proses memahami kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi potensi lokal, menentukan tujuan pemberdayaan, serta menetapkan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Dalam perspektif pemberdayaan, proses perencanaan perlu dilakukan secara partisipatif agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas, serta terlibat dalam penyusunan arah program. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Friedmann (1992) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kontrol terhadap sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal program agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kegiatan (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Dengan demikian, *Planning* dalam pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai proses membangun arah perubahan berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, bukan sekadar penyusunan kegiatan administratif.

2. Organizing: Membangun Struktur dan Kelembagaan Pemberdayaan

Tahap pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana sumber daya, peran, tanggung jawab, serta hubungan antaraktor diatur agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Program pemberdayaan masyarakat umumnya melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, kelompok masyarakat, pendamping, lembaga lokal, dan mitra pembangunan.

Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, keberhasilan

program tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan organisasi lokal dalam mengelola kegiatan secara terstruktur. Kajian Hermawati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui “Alokasi Dana Desa” membutuhkan koordinasi berbagai pihak agar program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan kelembagaan lokal juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program karena masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan secara mandiri setelah intervensi program berlangsung (Sari *et al.*, 2020).

Dengan demikian, *Organizing* dalam pemberdayaan masyarakat berfungsi membangun kapasitas kelembagaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola program secara kolektif dan berkelanjutan.

3. Actuating: Menggerakkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat

Fungsi penggerakan merupakan tahap implementasi yang menentukan apakah rencana pemberdayaan dapat berjalan secara nyata. Dalam konteks masyarakat, penggerakan tidak hanya berupa pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup proses membangun motivasi, meningkatkan keterampilan, memberikan pendampingan, dan memperkuat kepercayaan diri masyarakat.

Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup peningkatan kemampuan pada tingkat individu, organisasi, dan komunitas sehingga masyarakat mampu meningkatkan kontrol terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, proses penggerakan dalam pemberdayaan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar

mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku utama perubahan.

Praktik pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting dalam keberlanjutan usaha berbasis komunitas. Imang *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pelatihan manajemen keuangan dan pengembangan usaha mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Dengan demikian, *Actuating* dalam pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk mentransformasikan potensi masyarakat menjadi kemampuan yang nyata melalui proses pendampingan, pembelajaran, dan penguatan kapasitas.

4. Controlling: Menjamin Keberlanjutan dan Akuntabilitas Program

Pengawasan merupakan tahap yang memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif manajemen, fungsi pengawasan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan program (Terry & Rue, 2010).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas program. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan, mengukur keberhasilan kegiatan, serta memastikan keberlanjutan program.

Fahmi (2023) menunjukkan bahwa penerapan fungsi POAC dalam program berbasis desa memerlukan

proses monitoring dan evaluasi agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, *Controlling* dalam pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk memastikan program tetap relevan, akuntabel, dan mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

5. Sintesis Model Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis POAC

Berdasarkan pembahasan tersebut, artikel ini menawarkan model konseptual bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses manajemen yang berlangsung secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu:

- a. *Planning*
Proses mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memetakan potensi lokal, dan menentukan arah program pemberdayaan.
- b. *Organizing*
Proses membangun kelembagaan, membagi peran, serta mengembangkan koordinasi antar-aktor pemberdayaan.
- c. *Actuating*
Proses menggerakkan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, motivasi, dan peningkatan kapasitas.
- d. *Controlling*
Proses monitoring, evaluasi, dan perbaikan program untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan.

Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut dikelola melalui prinsip-prinsip manajemen yang sistematis.

Dengan mengintegrasikan teori manajemen POAC dan teori pemberdayaan masyarakat, artikel ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan sosial yang membutuhkan keseimbangan antara partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dan manajemen program sebagai mekanisme pengarah perubahan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, artikel ini memberikan kontribusi dengan memperluas pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dipandang sebagai proses sosial, tetapi juga sebagai proses manajemen.

Pendekatan pemberdayaan selama ini banyak menekankan aspek partisipasi, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017). Namun, keberhasilan proses tersebut juga membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mengarahkan berbagai sumber daya menuju tujuan bersama.

Integrasi POAC memberikan kerangka analisis bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh keterkaitan empat fungsi utama:

1. Perencanaan memastikan program memiliki arah dan tujuan yang jelas.
2. Pengorganisasian membangun struktur kelembagaan dan koordinasi.
3. Penggerakan menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.
4. Pengawasan menjaga kualitas dan keberlanjutan program.

Dengan perspektif tersebut, POAC dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menganalisis bagaimana suatu program pemberdayaan dirancang dan dikelola.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, model manajemen pemberdayaan berbasis POAC dapat memberikan pedoman bagi berbagai pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

- a. Pemerintah dan lembaga pembangunan

Pemerintah perlu memastikan bahwa program pemberdayaan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan yang partisipatif akan meningkatkan kesesuaian program dengan kondisi lokal serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program.

- b. Organisasi dan kelembagaan masyarakat

Kelembagaan lokal perlu memperkuat aspek pengelolaan organisasi, termasuk pembagian peran, koordinasi, dan pengembangan kapasitas anggota. Cahyanto *et al.* (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan BUMDes, aspek kelembagaan dan pengelolaan program memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

- c. Pendamping masyarakat

Pendamping perlu berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Shiddiq dan Khikmawati (2022) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pemberdayaan yang mampu membangun keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) memiliki relevansi sebagai kerangka konseptual dalam memahami proses pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

Planning berperan dalam memastikan program disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat. *Organizing* mendukung pembentukan kelembagaan serta pembagian peran antar-aktor. *Actuating* menjadi proses membangun keterlibatan masyarakat melalui pendampingan, motivasi, dan peningkatan kapasitas. Sementara itu, *Controlling* memastikan program berjalan sesuai tujuan melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan fungsi manajemen secara sistematis.

Artikel ini menghasilkan model konseptual bahwa POAC dapat menjadi salah satu kerangka analisis dalam mengintegrasikan prinsip manajemen dengan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Model tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus menekankan pentingnya tata kelola program yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui studi empiris untuk menguji penerapan model POAC dalam berbagai konteks pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amri, K., & Ferizko, A. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 13 (1), 227–236.
<https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4106>
- Cahyanto, A., Marwanto, I. G. G. H., & Pramono, T. (2024). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Lestari di Desa Bangunjaya Pakel Tulungagung. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1 (3), 297–305.
<https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i3.5382>
- Fahmi, F. (2023). Penerapan Fungsi POAC pada Upaya Penurunan Angka Stunting Desa Sibalaya Selatan. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1 (2), 144–153.
<https://doi.org/10.55606/makreju.v1i2.1345>
- Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management* (C. Storrs, Trans.). Pitman Publishing.
- Firman, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7 (1), 132–146.
<https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishing.
- Harahap, M. E. U. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2 (1), 189–204.
<https://doi.org/10.24952/tad.v2i1.2638>

- Hermawati, Eliza., & Utami, S. (2020). Manajemen Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping. *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11 (1), 68-88. <https://doi.org/10.15548/jt.v11i1.1498>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, W. D. A. (2016). Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *J+PLUS UNESA (Jurnal Pendidikan Luar Sekolah)*, 5 (1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/16059>
- Saputra, F., & Ali, H. (2022). Penerapan Manajemen POAC: Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional pada Masa Pandemi COVID-19 (Literature Review Manajemen POAC). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3 (3), 316-328. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>
- Sari, R. R., Siahainenia, R. R., & Hadiwijoyo, S. S. (2020). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pembangunan Kelurahan Berkelanjutan Berbasis Agrowisata di Kumpulrejo, Kota Salatiga. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8 (2), 187-201. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.187-201>
- Shiddiq, H. A., & Khikmawati, N. (2022). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat oleh Dompot Dhuafa (Studi Kasus Pengrajin Rotan di Desa Leuwilaja, Kabupaten Majalengka). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 4 (1), 59-76. <https://doi.org/10.18326/imej.v4i1.59-76>
- Susanto, A. (2022). Penerapan Prinsip POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4 (2), 293-312. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v4i2.211>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43-63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2